

# RENCANA AKSI TAHUN 2022

## PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II



**Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi,  
Delta Mas. Sukamahi. Cikarang Pusat.  
Kabupaten Bekasi. Jawa Barat**



Rencana Aksi Perjanjian Kinerja  
Pengadilan Negeri Cikarang  
Tahun 2022

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

*“Terwujudnya Pengadilan Negeri Cikarang Yang Agung”*

dengan Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Cikarang;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Peradilan Umum.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2022 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
PENGADILAN NEGERI CIKARANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan ( <i>diambil dari IKU</i> )	100%	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	25%	25%	25%	25%
		- Pidana	25%	25%	25%	25%
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara				
		- Perdata	25%	25%	25%	25%
		- Pidana	25%	25%	25%	25%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :				
		1. Banding	25%	25%	25%	25%
		2. Kasasi	25%	25%	25%	25%
		3. Peninjauan Kembali	25%	25%	25%	25%
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%	25%	25%	25%		
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	50%	-	50%		
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	25%	25%	25%	25%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25%	25%	25%	25%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	25%	25%	25%	25%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	25%	25%	25%	25%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	25%	25%	25%	25%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	25%	25%	25%	25%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25%	25%	25%	25%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	25%	25%	25%	25%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Percepatan Penyelesaian Perkara								
	a. Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Perkara	√	√	√	√			9.000.000	
	b. Dukungan Penyelesaian Perkara	√	√	√	√			1.500.000	
2.	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat	√	√	√	√				
	a. Pendaftaran Berkas Perkara	√	√	√	√			191.250.000	
	b. Penetapan Hari Sidang	√	√	√	√			11.000.000	
	c. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	√	√	√	√			56.240.000	
	d. Pemeriksaan di sidang pengadilan	√	√	√	√	Penegakan dan pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	12.000.000	
	e. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	√	√	√	√			3.000.000	
	f. Minutasi / Upaya Hukum	√	√	√	√			7.000.000	
	g. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√			5.000.000	
	h. Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√			2.500.000	
3.	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan								
	a. Pos Bantuan Hukum	√	√	√	√			24.000.000	